



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat nama dan kelas jabatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu penyesuaian nama dan kelas jabatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
- b. jabatan fungsional; dan
- c. jabatan administrasi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRASMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
2	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
3	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
4	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama	15
5	Kepala Bagian Kerjasama	12
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
7	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15
8	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	12
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
10	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	15
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
12	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
14	Kepala Biro Hukum	15
15	Kepala Bagian Advokasi Hukum	12
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
17	Kepala Biro Umum dan Layanan	15

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Pengadaan	
18	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	12
19	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	12
20	Kepala Sub Bagian Protokol	9
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9
22	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	12
23	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	17
24	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	15
25	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
26	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
27	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	14
28	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
29	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	14
30	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
31	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	14
32	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
33	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	14
34	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
35	Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	14
36	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
37	Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	17
38	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	15
39	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
40	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
41	Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
42	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
43	Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14
44	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
45	Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14
46	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
47	Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14
48	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
49	Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14
50	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
51	Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	17
52	Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	15
53	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
54	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
55	Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	14
56	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
57	Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	14
58	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
59	Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	14
60	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
61	Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	14
62	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
63	Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	14
64	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
65	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
66	Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15
67	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
68	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
69	Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	14
70	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
71	Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14
72	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
73	Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	14
74	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
75	Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	14
76	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
77	Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi	14
78	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
79	Inspektur Jenderal	17
80	Sekretaris Inspektur Jenderal	15
81	Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum	12
82	Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	9
83	Kepala Subbagian Umum	9
84	Inspektur I	15
85	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
86	Inspektur II	15
87	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
88	Inspektur III	15
89	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
90	Inspektur IV	15
91	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
92	Inspektur V	15
93	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
94	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	17
95	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
96	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
97	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
98	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	14
99	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
100	Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	14
101	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
102	Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	14
103	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
104	Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	14
105	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
106	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
107	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15
108	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	12
109	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
110	Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	14
111	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
112	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	14
113	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
114	Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	14
115	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
116	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	14
117	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
118	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	14
119	Kepala Bagian Tata Usaha	12
120	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan	9
121	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9
122	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	14
123	Kepala Bagian Tata Usaha	12
124	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan	9
125	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9
126	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	13
127	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
128	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	13
129	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
130	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	13
131	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
132	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	13
133	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
134	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	13
135	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
136	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	13
137	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
138	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	13
139	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

B. Jabatan dan Kelas Jabatan Staf Ahli Menteri

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
2	Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
3	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
5	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
6	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16

C. Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Analisis Advokasi Hukum	7
2	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7
3	Analisis Barang Milik Negara	7
4	Analisis Bencana	7
5	Analisis Data dan Informasi	7
6	Analisis Diklat	7
7	Analisis Hukum	7
8	Analisis Hukum Pertanahan	7
9	Analisis Humas	7
10	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7
11	Analisis Kawasan Transmigrasi	7
12	Analisis Kelembagaan	7
13	Analisis Kemitraan	7
14	Analisis Keuangan	7
15	Analisis Kerjasama	7
16	Analisis Kerjasama Pelatihan	7
17	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7
18	Analisis Kerjasama Diklat	7
19	Analisis Kerjasama Bilateral Dan Regional	7
20	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
21	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7
22	Analisis Kesehatan	7
23	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
24	Analisis Kinerja	7
25	Analisis Koperasi	7
26	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
27	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
28	Analisis Laporan Keuangan	7
29	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7
30	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7
31	Analisis Layanan Umum	7
32	Analisis Lingkungan Hidup	7
33	Analisis Mitigasi Bencana	7
34	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
35	Analisis Organisasi	7
36	Analisis Pangan	7
37	Analisis Pariwisata	7
38	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7
39	Analisis Pelayanan	7
40	Analisis Pelayanan Sosial	7
41	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7
42	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7

43	Analisis Pembangunan	7
44	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
45	Analisis Pemerintahan Pusat	7
46	Analisis Pendidikan	7
47	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
48	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
49	Analisis Pengawasan	7
50	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7
51	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7
52	Analisis Pengembangan Energi	7
53	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
54	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
55	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
56	Analisis Pengembangan Penilaian Tanah dan Kawasan	7
57	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
58	Analisis Perbendaharaan	7
59	Analisis Perekonomian	7
60	Analisis Perencanaan	7
61	Analisis Perencanaan Anggaran	7
62	Analisis Perencanaan dan Program	7
63	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7
64	Analisis Perencanaan Strategis	7
65	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
66	Analisis Pertanahan	7
67	Analisis Produk Hukum	7
68	Analisis Program	7
69	Analisis Program Diklat	7
70	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7
71	Analisis Protokol	7
72	Analisis Publikasi	7
73	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
74	Analisis Sistem Informasi	7
75	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
76	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7
77	Analisis Sosial Budaya	7
78	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
79	Analisis Survey, Pengukuran dan Pemetaan	7
80	Analisis Tata Laksana	7
81	Analisis Tata Ruang	7
82	Analisis Tata Usaha	7
83	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7
84	Penelaah Dampak Lingkungan	7
85	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7
86	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
87	Penelaah Pengembangan Usaha	7
88	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
89	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7

90	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
91	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7
92	Penyusun Laporan Keuangan	7
93	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
94	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7
95	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	7
96	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis UMKM	7
97	Penyusun Rencana Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil	7
98	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7
99	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
100	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
101	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
102	Penyusun Rencana Keuangan dan BMN	7
103	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	7
104	Penyusun Rencana Mutasi	7
105	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7
106	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
107	Penyusun Rencana Promosi	7
108	Penyusun Rencana Tata Ruang	7
109	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7
110	Penyusun Risalah	7
111	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7
112	Ajudan	6
113	Pengelola Anggaran	6
114	Pengelola Bahan Perencanaan	6
115	Pengelola Bantuan Hukum	6
116	Pengelola Barang Milik Negara	6
117	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6
118	Pengelola Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	6
119	Pengelola Data	6
120	Pengelola Data dan Informasi	6
121	Pengelola Data Kekayaan Budaya	6
122	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6
123	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6
124	Pengelola <i>Database</i>	6
125	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
126	Pengelola Dokumen Perizinan	6
127	Pengelola Dokumentasi	6
128	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6
129	Pengelola Gaji	6
130	Pengelola Informasi Kerjasama	6
131	Pengelola Informasi Kepariwisata	6

132	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
133	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6
134	Pengelola Kepegawaian	6
135	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6
136	Pengelola Keuangan	6
137	Pengelola Layanan Kehumasan	6
138	Pengelola Lingkungan	6
139	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6
140	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6
141	Pengelola Pemasaran	6
142	Pengelola Pembinaan dan Pengelolaan Perekonomian	6
143	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6
144	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
145	Pengelola Penelitian	6
146	Pengelola Pengembangan Karir	6
147	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6
148	Pengelola Permodalan dan Investasi	6
149	Pengelola Pertanahan	6
150	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6
151	Pengelola Program dan Kegiatan	6
152	Pengelola Rumah Tangga	6
153	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
154	Pengelola Surat	6
155	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Rencana	6
156	Pengolah Data	6
157	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6
158	Pengolah Data Laporan Keuangan	6
159	Pengolah Data Perbendaharaan	6
160	Petugas Protokol	6
161	Pranata Barang dan Jasa	6
162	Pranata Kearsipan	6
163	Pranata Ketransmigrasian	6
164	Sekretaris	6
165	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6
166	Verifikator Anggaran	6
167	Verifikator Keuangan	6
168	Komandan Petugas Keamanan	5
169	Operator mesin	5
170	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5
171	Pengadministrasi Anggaran	5
172	Pengadministrasi Data Perundang-Undangan	5
173	Pengadministrasi Hukum	5
174	Pengadministrasi Kepegawaian	5
175	Pengadministrasi Keuangan	5
176	Pengadministrasi Pelatihan	5
177	Pengadministrasi Pemerintahan	5
178	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5

179	Pengadministrasi Persuratan	5
180	Pengadministrasi Pertanahan	5
181	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5
182	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
183	Pengadministrasi Umum	5
184	Pengemudi	5
185	Pengemudi VIP	5
186	Petugas Keamanan	5
187	Pranata Acara	5
188	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5

D. Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
2	Pranata SDM Aparatur	Terampil	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
3	Analisis Kepegawaian/Analisis SDM Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
4	Arsiparis	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
Ahli Utama	13		
5	Assesor SDM Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
6	Auditor	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	9
		Ahli Pertama	9

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
		Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	10 12 14
7	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
8	Pranata Komputer	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 9 11 13
9	Dokter Gigi	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
10	Dokter	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
11	Peneliti	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 11 14
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
13	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 10 11 14

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
14	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	13
15	Analisis Hukum	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
16	Perawat	Pelaksana Pemula	5
		Pelaksana	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
17	Perencana	Ahli Pertama	9
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
18	Pranata Humas	Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11

19	Statistisi	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
20	Widyaiswara	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	14

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
21	Analisis Anggaran	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
22	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
23	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Pemula Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia	5 6 7 8

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh